BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi ekternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera. Kinerja sektor publik merupakan hal terpenting dalam mewujudkan pembangunan nasional guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Susan, 2019).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkuaitas juga (Mohamad Mahsunn, 2012:25).

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia

payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai (Ira Halidayanti, 2014).

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. (I Putu Deddy dan Sang Ayu, 2021).

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama

bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (BPPK DepKeu : 2014).

Fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah terjadi di Belitung. Secara umum, penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Belitung pada tahun 2019 dapat dikatakan baik/berhasil. Hal ini, di dasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Belitung 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Belitung 2019. Hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa dari 14 (empat belas) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis dari 20 indikator Kinerja Utama sebagai Berikut: 10 indikator atau 50% melebihi target dengan kategori Sangat Berhasil, 2 indikator atau 10% terealisasi dengan kategori Sangat Berhasil, 2 indikator atau 10% belum terealisasi dengan kategori Sangat Berhasil, 2

indikator atau 10% belum terealisasi dengan kategori Berhasil, 2 indikator atau 10% belum terealisasi dengan kategori Cukup, 1 indikator atau 5% belum terealisasi dengan kategori Kurang, dan 1 indikator atau 5% tidak tersedia data. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perbaikan pada tahun berikut. (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019)

Fenomena lainnya yang terjadi yaitu Wagub Babel Tegaskan OPD akan dihapuskan jika kinerjanya jelek. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di kabupaten Belitung, melakukan penguatan reformasi birokrasi (RB) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) dan zona integritas (ZI) di Pemerintah Kabupaten Belitung. Sistem tersebut dicetus oleh kementrian Reformasi Birokrasi melalui tim Asisten. Penguatan RB, SAKIP dan ZI itu dinilai sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar mendapatkan nilai di atas sekarang ini. “Saya yakin apabila dapat menerapkan sistem ini, nilai akuntabilitas dari kinerja Belitung yang saat ini mendapat nilai Cc, bisa berubah, kalau tidak B menjadi Bb dan manfaatnya dia akan terlihat,” kata Wakil Geburnur Provinsi Bangka Belitung Abdul Fattah kepada Posbelitung.com, jumat(14/6/2019). Apabila terdapat OPD-OPD yang tidak melahirkan suatu kinerja, kata Abdul Fattah, dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, melalui sistem ini maka bisa dihapuskan OPD tersebut atau digabungkan dengan organisasi lain. (Sumber :

https://belitung.tribunnews.com/2019/06/14/video-wagub-babel-tegaskan-opd-akan-dihapus-jika-kinerjanya-jelek).

Fenomena lainnya yang terjadi yaitu SPIP dan APIP 9 Pemda di Babel rendah bikin rawan korupsi. Depalan Pemerintah Daerah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung masih rendah dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan internal pemerintah (APIP), hal ini membuat rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk SPIP baru Kabupaten Bangka Tengah yang berhasil berada di level 3, sedangkan enam pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi, Pangkalpinang, Bangka, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung timur di level 2. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan masih berada di level 1. “Di Babel targetnya harus 6 yang sudah level 3,” kata Deputi Kepala BPKB Bidang Pengawasan Penyelenggaraan keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) RI, Gatot Darmasto dalam Kick Off Implementasi SIMDA perencanaan (E-planning) pada Pemerintah Provinsi Babel, di ruang pasir padi, rabu (10/10/2018).

Sedangkan untuk APIP tidak ada pemerintah daerah di Babel yang meraih level 3. Namun, baru dua Kabupaten yang berhasil meraih level 2 yakni Bangka dan Bangka Tengah. Enam pemerintah daerah lainnya masih berada level 1. Level SPIP dan APIP ini tediri dari 1-5, dengan level terendah 1 dan tertinggi 5. BPKP menargetkan paling tidak untuk SPIP dan APIP harus berada di level 3 untuk mengantisipasi tindak korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. “SPIP dan APIP yang menjadi soko guru dan pilar organisasi pemerintah agar bebas dari tindak korupsi,” tambahnya. Lebih lanjut ia menyampaikan, pemerintah daerah juga tidak hanya fokus mencapai level 3.

“Level 3 jangan hanya angka tapi esensinya, harus bener-bener level 3, ini jangan hanya mendorong untuk WTP. Tapi esensi dari level 3 itu untuk menyelenggarakan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya. (Sumber : https://bangka.tribunnews.com/2018/10/10/spip-dan-apip-8-pemda-di-babel-rendah-bikin-rawan-korupsi)

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka dapat dilihat bahwa kinerja instansi pemerintah daerah belum optimal.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja instansi. Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja instansi (Kurniawan, 2014). Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kumpulan informasi financial suatu perusahaan yang didapat dari aktivitas transaksi keuangan. Sistem informasi yang baik menjadikan manajemen suatu perusahaan bisa mendapatkan informasi yang beraneka ragam terutama terkait dengan pedoman dalam pengambilan keputusan. Satu dari beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan kinerja instansi adalah dengan mewujudkan sistem informasi yang handal sebab sistem informasi tersebut harus dapat dipergunakan oleh penggunanya. Keandalan suatu sistem informasi yang ada dapat berjalan dengan sebaik mungkin (Ikhsan , 2019).

Kualitas yang tinggi dari suatu informasi dapat membantu pengguna dalam melakukan tindakan yang diharapkan. Pengguna memerlukan suatu informasi yang berkualitas karena akan dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh instansi. Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan unsur-unsur dan

subunsur yang saling keterkaitan atau terhubung dalam mendapatkan hasil suatu informasi yang berkualitas (Purnamasari, 2015).

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja instansi (Sanggemi, Ronisimus, 2017). Kompetensi sumber daya manusia adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan prestasi kerja yang sangat baik. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan dan kemampuan. Kata dasarnya kompeten, berarti cakap, mampu atau terampil (Sedarmayanti, 2017:26).

Kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Emilda Ihsanti, 2014). Sumber daya manusia adalah keseluruhan orang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta. Kinerja instansi pemerintah yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan sehingga sumber daya manusia menjadi penggerak rodak organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Nuraini, 2013).

Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi (Nur Cholis dan Fadli, 2018). Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi,

dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan (Chici, 2017).

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi pemerintah (Azlina, 2019). Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Dadang, 2014)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Gede Teri Andika, I Gusti Ayu Purnamawati & Made Arie Wahyuni (2016) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kualitas Informasi dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan dan Penelitian Muhammad Aulia Ramadhan dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hasil dari penelitian

Muhammad Aulia Ramadhan menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INSTANSI (Survei pada Dinas-Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasaran latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
2. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
3. Bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
4. Bagaimana kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
5. Seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
7. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
8. Seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
4. Untuk mengetahui dan menganlisis kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

8. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi, khususnya pada materi Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis
   a. Hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pasundan Bandung.
   b. Diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi (Survey pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung).

2. Bagi Instansi Terkait

   Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Meningkatkan kinerja Instansi.

3. Bagi Pihak Lain

   Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi mengenai Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi, serta memperluas wawasan pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Waktu penelitian dimulai pada bulan September sampai dengan selesai